

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah dan panjang garis pantai mencapai 104.000 km (Bakosurtanal, 2006). Total luas laut Indonesia sekitar 3,544 juta km<sup>2</sup> (Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2010) atau sekitar 70% dari wilayah Indonesia. Keadaan tersebut seharusnya mampu meletakkan sektor perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia.

Menurut Daryanto (2007), sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*, dan keempat Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif.

Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta *stakeholders* lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.

Potensi perikanan laut sesungguhnya merupakan asset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun asset ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa alasan pembangunan kelautan menjadi penting untuk dilakukan antara lain karena:

- a. Indonesia memiliki sumberdaya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun keragamannya.
- b. Sumberdaya laut merupakan sumberdaya yang dapat dipulihkan, artinya bahwa ikan ataupun sumberdaya laut lainnya dapat dimanfaatkan, namun harus memperhatikan kelestariaannya, sehingga nantinya masih terus dapat diusahakan.
- c. Penghasil devisa negara.

Udang dan beberapa jenis ikan ekonomis penting seperti tuna, cakalang ataupun lobster, saat ini merupakan komoditi ekspor yang menghasilkan devisa negara diluar sektor kehutanan maupun pertambangan.

- d. Memperluas lapangan kerja.

Dengan semakin sempitnya lahan pertanian di areal daratan, dan semakin tingginya persaingan tenaga kerja di bidang industri, maka salah satu alternatif dalam penyediaan lapangan kerja adalah di sektor perikanan.

- e. Industri perikanan berhubungan luas dengan industri-industri lainnya, industri perikanan berhubungan erat dengan industri lainnya misalnya dalam pengadaan kapal, pengadaan bahan bakar minyak (BBM), juga pengadaan sarana dan prasarana lain

## 1.2. Permasalahan

Provinsi Riau memiliki potensi perikanan laut dan budidaya yang tinggi belum optimal dikembangkan. Posisi geografis yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura merupakan pasar potensial sehingga pembangunan perikanan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Produksi perikanan Provinsi Riau tahun 2012 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Produksi Perikanan Provinsi Riau Per Kabupaten (Ton).

No	Kabupaten	Produksi (Ton)				Nilai Prod (Ribu Rupiah)
		Perikanan Laut dan Budidaya	Perairan Umum	Tambak	Keramba	
1	Kuansing		89.0	-	4,486.0	-
2	Indragiri Hulu	-	2,392.3	-	315.7	-
3	Indragiri Hilir	40,096.1	4,017.6	411.5	371.0	-
4	Pelalawan	4,273.9	2,202.4	129.0	3,374.7	-
5	Siak	472.8	1,093.3	-	854.1	-
6	Kampar	-	2,429.9	-	22,242.7	-
7	Rokan Hulu	-	1,866.2	-	3,048.8	-
8	Bengkalis	2,345.5	-	60.1	1,069.8	-
9	Rokan Hilir	45,466.0	1,877.7	31.0	702.7	-
10	Kep. Meranti	2,028.4	-	4.9	15.1	-
11	Pekanbaru	-	100.2	-	1,851.0	-
12	Dumai	928.3	-	9.4	130.9	-
2012		95,611.0	16,068.6	645.9	38,462.5	3,163,817,289
2011		90,505.3	12,285.7	5,753.0	41,395.9	3,220,973,502
2010		77,113.5	12,191.2	1,812.3	41,873.0	1,969,782,332
2009		75,517.5	12,380.6	690.6	35,263.0	1,746,407,013
2008		87,919.2	13,977.7	876.9	29,387.5	2,121,928,760

Sumber : BPS Provinsi Riau

Agar mampu menjadikan sector perikanan sebagai *prime mover* perekonomian Provinsi Riau maka perlu diketahui bagaimana pembangunan perikanan selama ini dilakukan, kebijakan politik, social, ekonomi terhadap pembangunan perikanan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi

pembangunan perikanan di Provinsi Riau. Sehingga keterkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Perikanan dimaksudkan untuk :

1. Bagaimana mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, potensi dan masalah pembangunan perikanan di Provinsi Riau.
2. Bagaimana mendapatkan data faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan perikanan di Provinsi Riau.

### **1.3.Tujuan dan Keluaran**

#### **1.3.1. Tujuan**

Penelitian mengenai Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Perikanan di Provinsi Riau secara umum bertujuan membangun model pembangunan perikanan di Provinsi Riau. Secara spesifik bertujuan untuk:

1. Menganalisis daya saing dan menentukan sektor basis/non basis perikanan di Provinsi Riau.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan perikanan di Provinsi Riau.

#### **1.3.2. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Merumuskan arahan kebijakan pengembangan pembangunan perikanan di Provinsi Riau.
2. Tersusunnya program pembangunan perikanan jangka pendek maupun jangka menengah.

### 1.3.2. Keluaran

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam pengetahuan terkait pengembangan pembangunan perikanan di Propinsi Riau.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak yang terkait dalam membuat kebijakan untuk pembangunan sektor perikanan di masa yang akan datang di Propinsi Riau
3. Memberikan informasi dan referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan perikanan di Provinsi Riau.
4. Sebagai bahan rujukan bagi para peneliti yang berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.